

Kepadatan Pemukiman dan Minimnya Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Ngupasan, Yogyakarta

Cintya Indriana Warsono, Junior Hendri Wijaya
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
Email Korespondensi: cintyaindriana12@gmail.com

ABSTRAK

Kelurahan Ngupasan yang terletak di pusat Kota Yogyakarta merupakan kawasan dengan nilai historis tinggi dengan kepadatan aktivitas masyarakat yang cukup intens. Seiring meningkatnya tekanan pembangunan, wilayah ini menghadapi dua tantangan utama: meningkatnya kepadatan permukiman dan minimnya ruang terbuka hijau (RTH). Gang-gang sempit, bangunan yang berdempetan, serta keterbatasan ventilasi alami menjadi permasalahan nyata yang berdampak pada kualitas hidup warga. Di sisi lain, keberadaan RTH yang semakin terbatas menurunkan kapasitas lingkungan dalam merespons perubahan iklim mikro, mengurangi kualitas udara, serta membatasi ruang interaksi sosial. Artikel ini membahas secara mendalam permasalahan tersebut berdasarkan kondisi aktual di lapangan serta menawarkan beberapa pendekatan penanganan yang bersifat partisipatif, dengan melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, melalui sinergi berbagai pihak, kawasan Ngupasan dapat ditata menjadi lingkungan yang lebih tertata, sehat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Permukiman padat; ruang terbuka hijau; penataan kawasan; partisipasi masyarakat; Kelurahan Ngupasan.

ABSTRACT

Ngupasan Village, which is located in the center of Yogyakarta City, is an area with high historical value with a fairly intense density of community activities. As development pressures increase, the region faces two main challenges: increasing settlement density and a lack of green open space (RTH). Narrow alleys, adjoining buildings, and limited natural ventilation are real problems that have an impact on the quality of life of residents. On the other hand, the increasingly limited existence of RTH reduces the capacity of the environment to respond to microclimate change, reduces air quality, and limits the space for social interaction. This article discusses these problems in depth based on actual conditions on the ground and offers several participatory handling approaches, involving the active role of the community, government, and other stakeholders. It is hoped that through the synergy of various parties, the Ngupasan area can be arranged into a more organized, healthy, and sustainable environment.

Keywords: Dense settlements; green open spaces; area planning; community participation; Ngupasan Village.

Informasi Artikel: Submit: 28-7-2024 Revisi: 27-8-2025 Diterima: 25-9-2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Permasalahan kepadatan permukiman adalah salah satu isu perkotaan yang semakin mendesak di berbagai wilayah, terutama di kota-kota besar Indonesia. Pertumbuhan penduduk

yang cepat, migrasi ke kawasan perkotaan, serta keterbatasan lahan menyebabkan tekanan yang tinggi terhadap ruang hidup masyarakat. Kondisi seperti ini, kebutuhan akan perumahan sering kali tidak sebanding dengan ketersediaan lahan yang layak huni. Akibatnya, muncul kawasan permukiman padat dengan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan minim fasilitas lingkungan.(Hachica & Triani, 2022; Sabiq & Nurwati, 2021)

Salah satu dampak nyata dari kepadatan permukiman adalah berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) padahal keberadaan RTH sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota, mengurangi polusi udara, serta menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat. (Dwihatmojo, 2016) Minimnya RTH tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga pada kualitas hidup, kesehatan mental, dan daya dukung lingkungan secara keseluruhan. Pertumbuhan kota yang pesat merupakan tantangan tersendiri bagi kawasan-kawasan bersejarah yang terletak di pusat kota. Kelurahan Ngupasan, yang berada di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, merupakan salah satu wilayah yang memiliki nilai historis dan kultural tinggi.(Rifa, 2024) Di sisi lain, kawasan ini juga mengalami tekanan akibat meningkatnya kebutuhan ruang dan penambahan jumlah penduduk. Keterbatasan lahan menyebabkan pemukiman tumbuh secara padat dan kurang terencana, yang berdampak langsung pada kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup masyarakat. (Kurniati & Zamroni, 2021)

Fenomena kepadatan permukiman di Ngupasan dapat diamati melalui struktur bangunan yang berdempetan, jalan lingkungan yang sempit, serta keterbatasan akses terhadap cahaya alami dan ventilasi udara. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas kesehatan lingkungan, tetapi juga memperbesar risiko keselamatan, terutama dalam situasi darurat. Gang-gang sempit misalnya, menyulitkan akses kendaraan layanan darurat seperti ambulans atau pemadam kebakaran.

Selain itu, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah ini sangat terbatas. RTH memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meredam suhu panas perkotaan, serta menyediakan ruang interaksi sosial yang sehat. Di kawasan padat seperti Ngupasan, ketiadaan RTH memperburuk kondisi lingkungan, meningkatkan risiko genangan air saat hujan, dan mengurangi kenyamanan hidup masyarakat. Warga terpaksa melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti senam pagi atau pertemuan RT, di tepi jalan karena tidak adanya ruang publik yang layak.

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dua permasalahan utama yang dihadapi Kelurahan Ngupasan, yaitu kepadatan permukiman dan minimnya ruang terbuka hijau. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kontekstual berdasarkan observasi lapangan dan sumber data lokal, serta mengusulkan beberapa solusi berbasis partisipasi masyarakat untuk perbaikan tata ruang di kawasan ini. Kelurahan Ngupasan sebagai salah satu wilayah strategis di pusat Kota Yogyakarta menghadapi tekanan perkotaan yang cukup kompleks. Pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan ruang hunian, serta aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi mendorong terjadinya alih fungsi lahan secara masif. Akibatnya, permukiman tumbuh secara padat dengan tata letak yang cenderung tidak terencana. Jalan lingkungan menjadi sangat sempit, ventilasi udara antar bangunan terbatas, dan kualitas ruang hidup masyarakat menurun.

Di sisi lain, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang idealnya berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan dan ruang publik justru semakin jarang dijumpai. Padahal, RTH sangat penting dalam mendukung kenyamanan, kesehatan, serta kegiatan sosial warga. Minimnya RTH menyebabkan kawasan menjadi lebih panas, kurang teduh, dan rentan terhadap genangan air saat musim hujan. Permasalahan ini perlu dikaji secara lebih mendalam, agar solusi yang ditawarkan tidak sekadar bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan pokok yang menjadi dasar dalam penyusunan artikel ini: Bagaimana kondisi kepadatan permukiman di Kelurahan Ngupasan dan apa dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup warga?, Sejauh mana ketersediaan dan fungsi ruang terbuka hijau di wilayah tersebut mendukung keseimbangan ekologis dan aktivitas sosial masyarakat?, Pendekatan seperti apa yang dapat diterapkan untuk menata kawasan padat tersebut secara partisipatif dan berkelanjutan?

Kelurahan Ngupasan merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekhasan sosial dan budaya yang kuat di tengah hiruk-pikuk perkembangan Kota Yogyakarta. Warga yang tinggal di wilayah ini sebagian besar merupakan penduduk lama, bahkan banyak di antaranya berasal dari generasi kedua atau ketiga yang sudah menetap sejak puluhan tahun lalu. Pola permukiman yang rapat dan saling berdekatan bukan semata hasil perencanaan teknis, melainkan juga mencerminkan kedekatan sosial yang telah terbangun secara turun-temurun.

Hubungan antarwarga di Ngupasan cenderung akrab dan komunal. Aktivitas sosial seperti gotong royong, pertemuan RT/RW, pengajian kampung, serta kegiatan seni budaya masih menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun, dinamika ini kini mulai menghadapi tantangan. Kepadatan bangunan dan keterbatasan ruang publik membuat sebagian aktivitas sosial terpaksa dilakukan di area sempit, bahkan di pinggir jalan atau halaman rumah pribadi. Hal ini tidak hanya membatasi skala dan kenyamanan kegiatan sosial, tetapi juga menimbulkan ketegangan ruang antarindividu dan antar keluarga.

Selain itu, munculnya aktivitas ekonomi baru, seperti penginapan, usaha kecil, dan jasa wisata di sekitar kawasan, membawa pengaruh terhadap pola interaksi warga. Beberapa rumah yang semula murni hunian, kini beralih fungsi sebagian menjadi ruang usaha. Perubahan fungsi ini, meskipun memberikan nilai ekonomi, juga memicu perubahan ritme sosial di lingkungan permukiman.

Konteks perencanaan kawasan, partisipasi masyarakat menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Karakter sosial warga Ngupasan yang terbuka terhadap dialog dan musyawarah harus dijadikan modal utama dalam merancang solusi tata ruang yang tepat. Pendekatan top-down semata tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pemahaman terhadap realitas sosial yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pelibatan aktif warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengatasi persoalan lingkungan di Ngupasan.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji kondisi kepadatan permukiman di Kelurahan Ngupasan serta dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Menganalisis ketersediaan dan peran ruang terbuka hijau (RTH) dalam menunjang keseimbangan ekologis dan aktivitas warga di kawasan padat perkotaan. Merumuskan pendekatan penataan kawasan yang berpijak pada kondisi sosial masyarakat serta mengedepankan prinsip partisipasi dan keberlanjutan.

Adapun manfaat dari kajian ini diharapkan dapat dirasakan dalam beberapa aspek, antara lain: Bagi masyarakat lokal, artikel ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi lingkungan tempat tinggal mereka dan pentingnya keterlibatan warga dalam proses penataan ruang. Bagi pemerintah daerah, hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan atau program yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam penanganan kawasan padat penduduk dan pengembangan ruang terbuka hijau. Bagi akademisi

atau peneliti, artikel ini dapat menjadi referensi awal dalam mengembangkan kajian-kajian lanjutan mengenai penataan kawasan urban berbasis sosial dan budaya lokal.

METODE PENELITIAN

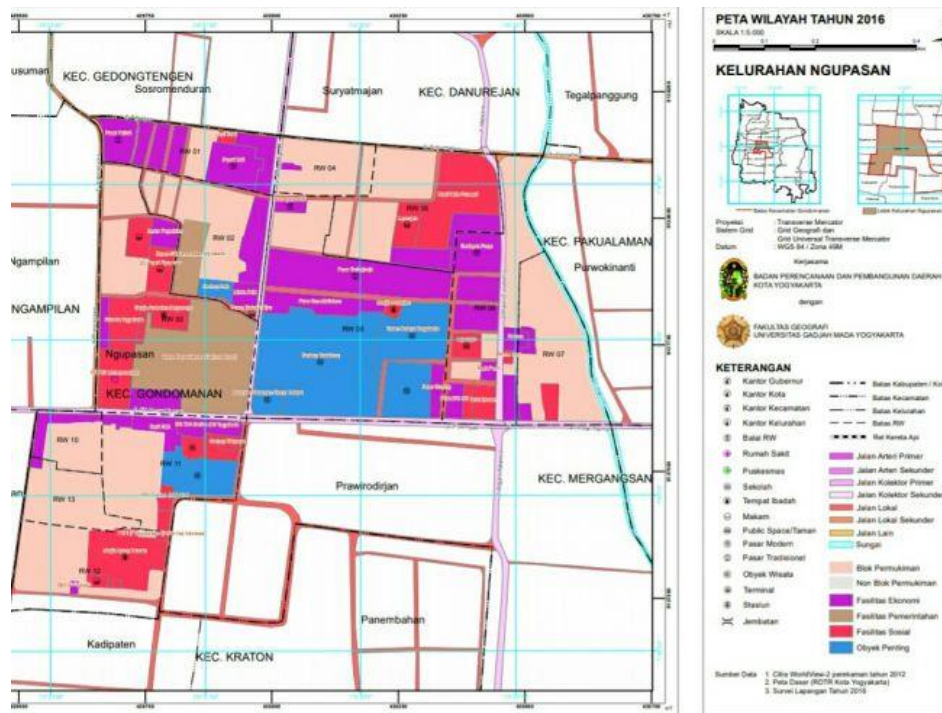
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang difokuskan pada kawasan permukiman padat di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam kondisi sosial, tata ruang, serta dinamika lingkungan masyarakat di wilayah perkotaan yang memiliki karakter historis dan kultural kuat. Tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan fenomena kepadatan permukiman dan keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi lapangan digunakan untuk mengidentifikasi kondisi fisik kawasan, seperti tingkat kepadatan bangunan, ketersediaan ruang publik, dan karakteristik lingkungan sekitar. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan berbagai pihak, antara lain warga, pengurus RT/RW, serta aparat kelurahan, untuk memperoleh informasi mengenai pola pemanfaatan ruang, aktivitas sosial, dan persepsi masyarakat terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah data sekunder seperti peta tata ruang kota, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Yogyakarta, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui analisis tematik. Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema utama, seperti pola kepadatan permukiman, fungsi sosial dan ekologis RTH, serta strategi penataan kawasan padat berbasis partisipasi masyarakat. Proses analisis dilakukan secara induktif, yakni menarik kesimpulan berdasarkan pola dan makna yang muncul dari data lapangan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, dengan cara membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen resmi guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.

HASIL DAN DISKUSI

Berangkat dari latarbelakang dapat dilihat letak geografis Kelurahan Ngupasan seperti pada gambar 1.



Gambar 1. letak geografis Kelurahan Ngupasan

Sumber: <https://ngupasankel.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum>

Dalam menghadapi tantangan kepadatan permukiman dan minimnya ruang terbuka hijau di Kelurahan Ngupasan, diperlukan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada masyarakat. Berdasarkan analisis permasalahan dan kondisi sosial di lapangan, berikut beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan:

Penataan Ulang Tata Ruang Skala Mikro

Dilakukan melalui identifikasi titik-titik padat yang masih memungkinkan untuk penataan kembali. Misalnya, dengan pengaturan ulang posisi bangunan, pelebaran gang-gang strategis, serta penambahan ventilasi silang antar bangunan untuk memperbaiki sirkulasi udara dan cahaya alami.(Suganda et al., 2009) Pendekatan ini memerlukan musyawarah bersama warga agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Penataan dilakukan melalui pengaturan ulang posisi bangunan yang memungkinkan terciptanya ruang antarbangunan untuk aliran udara, pelebaran gang-gang strategis agar dapat berfungsi ganda sebagai jalur evakuasi maupun akses darurat, serta penambahan ventilasi silang antar bangunan untuk memperbaiki kualitas sirkulasi udara dan cahaya alami di dalam lingkungan padat. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, karena memerlukan musyawarah bersama warga untuk menyepakati perubahan-perubahan tata ruang tanpa menimbulkan konflik kepemilikan atau kepentingan. Dalam konteks ini, prinsip partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan, sebab warga memiliki pengetahuan lokal yang penting mengenai sejarah, fungsi, dan nilai sosial setiap ruang di lingkungannya.

Penataan ulang tata ruang skala mikro, diharapkan tercipta keseimbangan antara kebutuhan ruang tinggal dan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini juga dapat menjadi model penerapan konsep urban acupuncture, yaitu intervensi kecil namun berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan padat perkotaan.

Optimalisasi Lahan Sempit Menjadi RTH Fungsional

Lahan sempit atau area kosong yang tidak termanfaatkan dapat dialihfungsikan menjadi taman mikro, taman vertikal, atau ruang hijau komunal. Bentuknya bisa sederhana, seperti taman kecil dengan tempat duduk, kebun bersama, atau jalur hijau di tepi gang. Solusi ini murah, fleksibel, dan bisa dikelola langsung oleh warga.

Desain RTH fungsional pada lahan terbatas dapat bersifat modular dan fleksibel, menyesuaikan kondisi fisik serta karakter sosial masyarakat setempat. Misalnya, taman kecil dengan tempat duduk sederhana dapat berfungsi sebagai ruang interaksi warga, sedangkan kebun bersama (community garden) dapat mendukung ketahanan pangan skala lokal melalui praktik urban farming. (Dadtun et al., 2025) Selain itu, jalur hijau di tepi gang atau dinding vertikal dengan tanaman rambat menjadi alternatif yang efektif untuk menambah area hijau tanpa memerlukan perluasan lahan secara horizontal. (Sjamsu et al., 2017)

Pendekatan ini relatif murah dan berkelanjutan, karena dapat dijalankan dengan sumber daya lokal dan dikelola langsung oleh warga melalui sistem gotong royong. Dengan demikian, optimalisasi lahan sempit tidak hanya menjawab persoalan ekologis perkotaan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Implementasi konsep ini

sejalan dengan prinsip pembangunan kota berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola ruang perkotaan.

Pelibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan

Partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan penataan kawasan. Forum kampung, RT/RW, atau kelompok swadaya masyarakat dapat dilibatkan sejak tahap perencanaan. Pelatihan atau fasilitasi dari pihak luar seperti perguruan tinggi atau LSM juga dapat membantu memperkuat kapasitas warga dalam merancang dan mengelola ruangnya sendiri. (Darin et al., 2022) Forum-forum tersebut menjadi ruang deliberatif untuk merumuskan prioritas dan menyepakati desain penataan yang inklusif. Keterlibatan warga dalam tahap awal ini juga dapat mencegah munculnya konflik kepentingan, karena keputusan diambil secara terbuka dan berbasis konsensus.

Selain itu, dukungan dari pihak eksternal seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas teknis warga. Melalui pelatihan, pendampingan, atau program fasilitasi teknis, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang prinsip desain ekologis, manajemen RTH, serta pemanfaatan teknologi sederhana untuk pemeliharaan ruang bersama. Pendekatan kolaboratif ini mempertemukan potensi lokal dengan keahlian teknis dari luar, sehingga menghasilkan model penataan yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis komunitas.

Kolaborasi Multi-Pihak

Rekomendasi penting lainnya adalah perlunya kerja sama lintas sektor. Pemerintah kelurahan, dinas terkait, akademisi, dan komunitas lokal dapat membentuk forum kolaboratif dalam mengawal implementasi program. Program CSR dari sektor swasta juga bisa diarahkan untuk mendukung pembangunan ruang terbuka hijau atau infrastruktur lingkungan di wilayah ini. Pemerintah kelurahan dapat berperan sebagai fasilitator utama yang menjembatani komunikasi antara warga dan lembaga teknis pemerintah daerah. Dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Lingkungan Hidup, dapat memberikan dukungan regulatif, teknis, dan pembiayaan dalam proses penataan ruang dan pembangunan RTH. (Purnomo & Handayani, 2019) Sementara itu, akademisi dan lembaga penelitian memiliki kontribusi penting dalam penyediaan data, analisis kebijakan, serta inovasi konseptual dan teknologi yang dapat memperkaya proses perencanaan dan evaluasi.

Selain aktor pemerintah dan akademik, sektor swasta juga memiliki peran strategis melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan CSR dapat diarahkan pada kegiatan seperti pembangunan taman lingkungan, penyediaan sarana daur ulang sampah, atau rehabilitasi area hijau publik. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan dapat diintegrasikan secara nyata dalam agenda keberlanjutan kota.

Keterlibatan komunitas lokal menjadi elemen pengikat dari seluruh kerja kolaboratif ini. Komunitas berperan menjaga kesinambungan kegiatan, mengelola fasilitas yang telah dibangun, serta memastikan ruang-ruang baru benar-benar bermanfaat bagi warga. Melalui sinergi multi-pihak ini, proses penataan kawasan padat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kapasitas sosial masyarakat dalam menghadapi tantangan urbanisasi di masa depan.

Penguatan Regulasi Tingkat Lokal

Pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan aturan yang lebih adaptif terhadap kawasan padat, seperti insentif bagi warga yang menyediakan ruang hijau di lahan pribadinya, atau pembatasan alih fungsi lahan hunian menjadi area komersial secara berlebihan. Regulasi yang tepat dan berpihak pada kualitas lingkungan akan mendorong keberlanjutan jangka panjang. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah pemberian insentif bagi warga atau kelompok masyarakat yang menyediakan ruang hijau di lahan pribadinya, baik dalam bentuk pengurangan retribusi, bantuan bibit tanaman, maupun dukungan teknis dari dinas lingkungan hidup. (Ardiyanti, 2016) Pendekatan ini akan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa penyediaan ruang terbuka hijau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga bagian dari kontribusi warga terhadap kualitas hidup bersama.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menerapkan pengendalian alih fungsi lahan secara ketat, khususnya terhadap konversi lahan hunian menjadi area komersial yang berlebihan. Fenomena ini kerap memicu peningkatan kepadatan dan penurunan kualitas lingkungan permukiman. Regulasi zonasi dan tata guna lahan perlu ditegakkan secara konsisten, disertai dengan mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan warga, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya lokal.

Lebih jauh, penguatan regulasi juga mencakup aspek koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan tata ruang. Kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan menjadi kunci agar setiap program penataan kawasan berjalan

sinkron dan tidak tumpang tindih. Dengan regulasi yang responsif, berpihak pada keberlanjutan lingkungan, dan disertai mekanisme pengawasan yang partisipatif, diharapkan upaya penataan kawasan padat dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

PENATAAN INFRASTRUKTUR

Kepadatan permukiman di Kelurahan Ngupasan membawa dampak langsung terhadap kondisi infrastruktur lingkungan. Banyak fasilitas dasar seperti saluran drainase, jalan lingkungan, serta sistem sanitasi yang tidak lagi memadai menampung beban aktivitas warga. Oleh karena itu, penataan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting yang harus dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko lingkungan. Drainase di kawasan padat seperti Ngupasan umumnya sempit dan tertutup oleh bangunan. Kondisi ini menyebabkan aliran air tidak lancar, bahkan menimbulkan genangan saat hujan. Rehabilitasi saluran air perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk penataan ulang jalur air agar tidak saling berpotongan dengan utilitas lain, serta penggunaan tutup saluran yang ramah perawatan.

Sebagian besar gang di Ngupasan memiliki lebar kurang dari satu meter. Hal ini menyulitkan mobilitas warga, terutama bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Jalan-jalan kecil perlu diperlebar secara selektif dengan memanfaatkan ruang-ruang bersama atau lahan kosong. Selain itu, perbaikan permukaan jalan, penerangan, dan rambu lingkungan juga menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Kawasan padat seperti ini membutuhkan solusi infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Misalnya, pembangunan tempat sampah terpadu berbasis komunal, fasilitas cuci tangan bersama, atau ruang serbaguna multifungsi yang bisa digunakan warga untuk rapat, kegiatan sosial, hingga sebagai tempat evakuasi darurat. Penataan infrastruktur perlu mengakomodasi prinsip keberlanjutan. Salah satu bentuknya adalah integrasi infrastruktur hijau, seperti trotoar berpohon, taman hujan (rain garden), atau sumur resapan kecil di titik-titik strategis. Infrastruktur semacam ini tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga memperbaiki kualitas udara dan memperindah lingkungan.

Penting untuk diingat bahwa penataan infrastruktur tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada upaya pemeliharaan yang konsisten. Diperlukan sistem pengelolaan yang jelas, baik oleh warga maupun pemerintah setempat, agar hasil pembangunan tidak cepat rusak dan tetap bermanfaat dalam jangka panjang.

PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) MINI

Di tengah keterbatasan lahan di kawasan padat seperti Kelurahan Ngupasan, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) tidak dapat dilakukan dengan pendekatan konvensional yang memerlukan lahan luas. Oleh karena itu, konsep RTH mini atau RTH skala lingkungan menjadi alternatif yang realistis dan relevan untuk diterapkan. RTH mini merujuk pada ruang terbuka bervegetasi dengan ukuran terbatas namun tetap berfungsi secara ekologis, estetis, dan sosial.

Banyak titik-titik kecil di lingkungan kampung seperti lahan di pojok RT, area kosong di dekat mushola, atau bekas tanah milik bersama yang terbengkalai dapat diubah menjadi RTH mini. Meski skalanya kecil, keberadaan ruang hijau ini mampu meningkatkan kenyamanan visual, menjadi tempat beristirahat, bahkan berfungsi sebagai penampung air hujan (resapan) di musim hujan.

Dalam ruang sempit, solusi vertikal menjadi jawaban. RTH vertikal dapat dibuat dari dinding kosong rumah warga, pagar sekolah, atau fasilitas umum lainnya dengan teknik sederhana seperti rak tanaman susun, pot gantung, hingga sistem hidroponik. Selain menghijaukan lingkungan, metode ini juga cocok untuk edukasi lingkungan anak-anak di kampung. RTH mini tidak hanya berfungsi sebagai elemen ekologi, tetapi juga bisa menjadi tempat berkumpul, bersosialisasi, atau belajar bersama. Misalnya, taman kecil dengan tempat duduk, tanaman obat keluarga (toga), dan papan informasi lingkungan dapat dimanfaatkan warga untuk aktivitas harian seperti pengajian, diskusi RT, atau kegiatan bermain anak-anak.

Pengembangan RTH mini tidak akan berjalan efektif tanpa pelibatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibentuk kelompok pengelola lingkungan (pokja hijau) yang dapat merencanakan, mengelola, dan merawat taman mini secara gotong royong. Pemerintah dapat mendukung dengan bantuan bibit, pelatihan hortikultura, serta insentif bagi kampung yang aktif dalam penghijauan. Pengembangan RTH mini sebaiknya dimasukkan dalam rencana pembangunan kampung (RPJMKel) agar keberlanjutannya terjaga. Dengan adanya payung perencanaan resmi, RTH mini tidak hanya menjadi proyek sesaat, tetapi bagian dari sistem pengelolaan ruang yang berkesinambungan.

- a) Optimalisasi lahan sempit untuk taman vertikal dan taman TOGA (Tanaman Obat Keluarga).
- b) Kolaborasi dengan sekolah dan lembaga sosial untuk menciptakan “taman saku”.

- c) Gunakan pendekatan urban farming untuk meningkatkan fungsi ekologis lahan kecil.

KESIMPULAN

Kelurahan Ngupasan sebagai kawasan permukiman padat di pusat Kota Yogyakarta menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas lingkungan dan tata ruang. Kepadatan bangunan yang tinggi, gang-gang sempit, serta minimnya ruang terbuka hijau menyebabkan berkurangnya kenyamanan, terganggunya sirkulasi udara dan cahaya, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Persoalan ini tidak hanya berdimensi fisik, tetapi juga sosial dan kultural, mengingat masyarakat di wilayah ini telah hidup berdampingan dalam struktur sosial yang kuat dan berlapis sejarah. Upaya penataan kawasan perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat kontekstual dan partisipatif. Penataan infrastruktur yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, seperti pelebaran akses jalan, perbaikan drainase, dan penyediaan fasilitas dasar berbasis komunitas, harus berjalan seiring dengan pengembangan ruang terbuka hijau dalam skala mini yang adaptif terhadap keterbatasan lahan.

Solusi yang ditawarkan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif warga sebagai pemilik ruang dan pelaku utama perubahan. Oleh karena itu, keberhasilan penataan kawasan di Ngupasan sangat bergantung pada kemauan semua pihak untuk berkolaborasi baik masyarakat, pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam merancang ruang hidup yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, H. (2016). Konsep dan regulasi tv lokal dalam kerangka penguatan budaya lokal. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2(2).
- Dadtun, Y. S., Irawan, R. N., Hidayat, M. H. S., Nugroho, S. A., Kartisabila, A. F., Aurellia, I. A., Putri, P. A., Ulum, S. J. M., Prasetyarini, R., & Athalla, J. D. (2025). Optimalisasi Lahan Kosong: Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau dan Kebun Toga Sebagai Solusi Lingkungan Berkelanjutan Desa Geneng, Klaten. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 4688–4696.
- Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 11–21.
- Dwihatmojo, R. (2016). Ruang terbuka hijau yang semakin terpinggirkan. *Dalam Http://Www.Bakosurtanal.Go.Id/Assets/Download/Artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSemaKinTerpinggirkan.Pdf, Diakses Tanggal, 4*.
- Hachica, E., & Triani, M. (2022). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan kepadatan

penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 63–70.

Kurniati, A. C., & Zamroni, A. (2021). Kategorisasi Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Publik untuk Menunjang Kenyamanan Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(1), 127–139.

Purnomo, A. Y. P., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Good Governance Dan E-Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan ...* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4233>

Rifa, M. (2024). *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Fenomena Urban Heat Island (UHI) di Kota Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.

Sabiq, R. M., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh kepadatan penduduk terhadap tindakan kriminal. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 161–167.

Sjamsu, A. S., Dharma, I., HB, A. A., & Amsyar, S. (2017). Wujud Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Studi Kasus: Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara”: *Jurnal Prosiding Temu Ilmiah IPLBI. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI*, 1.

Suganda, E., Atmodiwirjo, P., & Yatmo, Y. A. (2009). Menelaah Ruang Bertinggal Manusia pada Permukiman di sekitar Pasar: Permasalahan Perancangan Kota pada Skala Makro dan Mikro. *Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia*.